

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah merupakan suatu unsur multak yang diperlukan bagi suatu bangsa, sebab tiap-tiap masyarakat memiliki pendapat dan kebutuhan publik yang berbeda hal tersebut apabila tidak dapat terpenuhi dengan baik maka dapat menimbulkan konflik. Suatu pemerintahan diperlukan guna mengatur tata peri kehidupan masyarakat serta sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang baik (*Good Government*) sendiri dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik seiring dengan perubahan zaman, dan pergeseran kepentingan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Pergantian paradigma pemerintah dari orde baru menuju orde reformasi, berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dikatakan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Pemberian Otonomi daerah merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya serta mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Government*) dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945, Undang undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut ke dalam asas-asas umum yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, azas umum tersebut sekaligus dimaksudkan untuk memperkokoh landasan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah atau laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, serta suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang dihasilkan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemerintah dituntut agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan akan dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun internal dalam pengambilan keputusan. Informasi dapat dimanfaatkan apabila informasi tersebut mudah dipahami dan dapat dipercaya sehingga nantinya hasil dari keputusan diharapkan dapat memberikan dampak baik bagi pemerintah dimasa mendatang. Keberhasilan suatu entitas dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik di pengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Sumber daya manusia dikatakan berkualitas baik bila ia memiliki pendidikan, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga, apabila sumber daya manusia dalam suatu instansi tidak memiliki kualitas baik maka dapat mengakibatkan kualitas laporan yang tidak efektif, efisien dan ekonomis.

Faktor kedua yang tidak kalah penting yang mendukung pengelolaan keuangan pemerintah ialah sistem pengendalian intern. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2008

tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern harus diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah agar tujuan organisasi tercapai. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal yang dimiliki institusi pemerintah daerah. Pengendalian intern pemerintah daerah diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengendalian intern yang lemah membuka celah bagi suatu instansi untuk melakukan kecurangan/ketidakakuratan dalam melaksanakan suatu proses pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparansi. Untuk memenuhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah harus diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang selanjutnya diberikan opini atas kualitas laporan keuangan tersebut.

Sumber daya manusia yang berkualitas serta pengendalian intern yang baik belum cukup untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dibutuhkan salah satu faktor penentu lainnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dinilai penting dalam proses pengelolaan keuangan karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat mempermudah dan mempersingkat waktu pengerjaan. Dalam pembuatan laporan keuangan harus dituntut ketepatan waktu sehingga dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi mendukung pembuatan laporan lebih cepat sehingga dapat memenuhi kualitas laporan keuangan yang baik. Laporan keuangan yang dikerjakan dengan tepat waktu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan lebih cepat. Teknologi informasi seperti komputer dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat dari pada dikerjakan secara manual. Selain itu teknologi dibutuhkan sebagai alat pemrosesan dan penyimpanan informasi juga dapat digunakan untuk penyebaran informasi. Berdasarkan kutipan melalui media masa Sekertaris daerah Pemerintah Kota Palembang juga mengeluhkan bahwa pemanfaatan teknologi dirasa sangat penting guna mendukung transparansi dan akuntabilitas Pelaporan keuangan pemerintah. Dalam menciptakan transparansi dan kemudahan pelayanan menuju Palembang Emas 2018, penerapan teknologi akan

dapat mempengaruhi dan memicu sistem yang revolusioner. (Sumber: <http://www.palembang.go.id/berita>, diakses 11/03/2018 )

Sumber daya manusia yang berkualitas, pengendalian intern yang baik ditambah pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tolak ukur suatu pemerintahan dikatakan memiliki kualitas laporan keuangan yang baik dapat dilihat dari opini wajar yang diberikan oleh BPK. Kota Palembang merupakan salah satu kota yang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun belakang, sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa kualitas laporan keuangan di kota Palembang sudah sesuai dengan karakteristik kuantitatif laporan keuangan. Namun ditemukan fakta bahwa pemerintah kota Palembang belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2017 dikarenakan ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengumpulkan laporan keuangan kepada Pemkot Palembang sehingga laporan keuangan tersebut tidak bisa diaudit oleh BPK, hal ini tentunya berdampak terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. (sumber: [www.Palembang.tribunnews.com](http://www.Palembang.tribunnews.com), diakses 11/03/2018)

Menurut penelitian Reka Maiyarni (2017) bahwa Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern, sumber daya manusia, teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penelitian Sari dan Witono (2017) menyatakan bahwa Sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah sedangkan penelitian oleh Kiranayanti *et. al.* (2016) mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman basis akrual berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang ada penulis tertarik ingin melakukan penelitian namun penelitian yang dilakukan penulis terdapat perbedaan yakni penulis melakukan penelitian pada pemerintahan kota Palembang dan variabel indepen yang

digunakan adalah kualitas sumber daya manusia , sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang”**.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas , permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang ?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang ?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang ?
4. Apakah kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Palembang ?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini sehubungan dengan kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Penelitian ini dilakukan dengan unit pengamatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan pengetahuan yang lebih luas mengenai kompetensi sumber daya manusia, pengendalian intern pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi, terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang.

#### **2. Manfaat Praktis Bagi Instansi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah yaitu kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi. Sehingga dapat dijadikan refefensi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai sdengan karakteristik kuantitatif laporan keuangan agar dapat menghasilkan data berupa informasi

pada laporan keuangan yang tepat dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal maupun internal.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian ini dibagi dalam lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang landasan teori, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Sebagai bab terakhir dari penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan dan juga saran berdasarkan hasil penelitian.